BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Blitar merupakan daerah yang secara geografis terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur, yang memiliki jumlah penduduk 1.268.194 jiwa. Dengan luas wilayah 1.588.790 Km, mayoritas kehidupan masyarakatnya bekerja di sektor agraris. Pada pilkada serentak 2015, Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang memiliki satu calon kepala daerah. Dengan munculnya fenomena calon tunggal, maka mekanisme pemilihan yang digunakan adalah mekanisme referendum. Mekanisme referendum pada penyelenggaraan pilkada tahun 2015, merupakan mekanisme yang pertama kali digunakan dalam pemilihan bupati di Kabupaten Blitar.

Dinamika politik pada Pilkada calon tunggal di Kabupaten Blitar 2015 diawal memang tidak terlalu menunjukkan aktifitas-aktifitas politik. pada akhirnya para pesaing calon petahana membuat sebuah aliansi politik besar. Namun permasalahan muncul terjadi ketika aliansi besar yang disebut Koalisi Rakyat Berjuang tidak bisa menyelesaikan dinamika politik didalam tubuh koalisinya. Hingga akhir batas penutupan pendaftaran KRB tidak mendatarkan calon. Disisi lain pertarungan politik pilkada 2015 di Kabupaten

1

¹ www.Blitarkab.go.id, di akses pada (10-12-2016) pukul 11.50.

Blitar memang sangat menarik, ketika kemudian dihadapkan dengan corak kehidupan masyarakatnya yang majemuk.

Partisipasi civil society dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat ditunjukkan oleh adanya parpilar-pilar civil society, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas, yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.. Bentuk dari partisipasi civil society dalam pilkada calon tunggal memang sangat vital. Mereka sangat aktif dalam membuat agenda-agenda pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan penyediaan tempat sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Blitar. Selain kelompok yang sangat aktif dalam kegiatan untuk mensukseskan pilkada 2015, ada kelompok yang secara terang-terangan menolak adanya pilkada dengan satu pasangan calon (calon tunggal), mereka mlihat adanya degradasi demokrasi di Kabupaten Blitar. Fungsi pilar-pilar civil society menjadi penting sebagai perwujudan konsep civil society dalam sebuah masyarakat demokrasi. Maka perlu mengetahui sejauh mana civil society ini mampu memberikan kontribusi kepada proses pelaksanaan demokrasi pada pilkada calon tunggal.

Kehidupaan masyarakat Kabupaten Blitar yang majemuk dan memiliki sikap toleransi yang tinggi di lingkungan keagamaan maupun sosial, menjadikan ormas keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dapat berkembang dengan mudah. Beberapa ormas terbesar yakni Nahdlatul Ulama sebagai ormas berbasis agama, Paguyuban tani sebagai kelompok keprofesian dengan basis masanya adalah petani dan Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar.

Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi masyarakat yang memiliki basis massa cukup besar di Kabupaten Blitar, sehingga NU mempunyai posisi yang strategis dalam partisipasinya di pilkada Blitar 2015. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mengaomi masyarakat *nahdliyyin*, secara sukarela akan ikut dalam mensukseskan Pilkada berapapun calonnya. Dalam pemilihan calon bupati ini, NU menghimbau kepada warga *nahdliyyin* untuk melihat kualitas calon yang akan maju. Sehingga akan terlihat pemimpin yang benar-benar dapat mengayomi dan mempunyai visi/misi untuk membangun, tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun ummat.

Dalam kiprah politik, NU telah membuktikan bagaimana kekuatan dengan basis massa yang cukup besar. Keputusan NU untuk *khittah* memang sebuah keputusan yang tepat dan strategis untuk jangka panjang. NU berusaha untuk menghindarkan dari hal-hal yang akan mempersulit dalam perjuangannya dalam membela kepentingan-kepentingan kelembagaan dan kemaslahatan umat. Kembalinya NU ke *Khittah* merupakan upaya pemberdayaan warga *nahdliyyin* dan masyarakat dengan program-program sosial, ekonomi dan pendidikan. Meskipun NU telah *khittah*, NU tetap tidak bisa lepas dari kiprah politik kemudian yang terjadi adalah perubahan paradigma melalui perubahan orientasi politik sehingga NU lebih luwes dalam mensiasati berbagai perubahan maupun perkembangan yang akan terjadi. Langkah tersebut merupakan strategi, sebagai bentuk pemberdayaan *civil society*.²

² AS Hikam, Muhammad, *Demokratisasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999) Hal 242.

Selain kelompok NU, Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar juga dapat dikatakan sebagai organisasi yang mempunyai pungaruh cukup besar diwilayah pesisir Blitar. Dari segi geografis wilayah tempat tinggal mereka cukup jauh dari pusat ibu kota. Sehingga untuk arus perkembangan informasi yang mereka terima tidak begitu cepat. Terlebih dalam pilkada 2015 mereka tidak terlalu mengetahui tentang siapa calon yang akan maju, kemudian bagaimana teknis pemilihannya. Hal ini memang masih menunggu dari KPU Kabupaten Blitar terkait keputusan dari KPU Pusat.

Nelayan sebagai kelompok keprofesian yang cukup besar di wilayah pesisir Kabupaten Blitar. Pada momentum demokrasi mereka memiliki peran penting, seperti saat membantu proses pelaksanaan pilkada Kabupaten Blitar 2015. Memang dari awal berdirinya organisasi dan sampai sekarang, kelopok nelayan tidak menunjukan sikap berupa bentuk dukungan kepada partai atau calon tertentu. Sehingga dalam kegiatan partisipasi pada pilkada serentak, kelompok nelayan dapat memberikan kontribusi besar pada pelaksanaan *even* politik lima tahunan. Dengan terstrukturnya keanggotaan didialamnya, maka organisasi kelompok nelyan ini membuat program-program yang bersentuhan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang partisipasi politik, guna dapat terselenggaranya pelaksanaan pilkada 2015.

NU dan Kelompok Nelayan bukan hanya satu-satunya organisasi *civil* society di Kabupaten Blitar, namun peran penting dari kedua organisasi ini menjadi kunci mensuksekan agenda-agenda gerakan *civil society*. Disisi lain meskipun tokoh masing organisasi tidak ikut serta sebagai kontestan, keterlibatan

mereka dalam kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan pilkada 2015 menjadi komitmen utamanya. Program-program yang dilakukan oleh kedua organisasi ini, bertujuan sebagai bentuk pendewasaan demokrasi dan juga dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam pelaksanaan pilkada dengan mekanisme baru.

Selain NU dan kelompok nelayan, ormas Paguyuban Tani juga berpartisipasi dalam pilkada calon tunggal 2015. Bentuk-bentuk kegiatan yang sudah kelompok tani jalankan adalah membantu menyediakan tempat pengutan suara (TPS) serentak diseluruh kecamatan sutojayan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan setelah melakukan kordinasi dengan KPPS di Desa. Paguyuban Tani Makmur juga menyediakan tempat berupa gedung pertemuan milik kelompok tani. Sebelumnya kelompok tani makmur juga membuat kegiatan pendidikan politik guna mempersiapkan pemilih yang cerdas.³

Partispasi politik yang dilakukan oleh *civil society*, memang tidak sampai masuk kedalam dinamika politik pilkada, karena itu merupakan tugas dan wewenag parpol itu sendiri. Memang dalam pilkada 2015 dinamika politik sangat cepat, mulai dari alur perlaksanaan pilkada dengan diwarnai tarik ulur calon yang akan maju untuk melawan calon petahana kuat dengan didukung oleh partai terbesar di Kabupaten Blitar.

Masuk dalam ranah regulasi, sebelum adanya putusan MK yang mengesahkan calon tunggal dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kabupaten Blitar dinyatakan gagal dalam mengikuti pilkada serentak pada tahap pertama

³ Suparno, *Wawancara*, Kantor Kelompok Tani Desa sutojayan, 24 Januari 2017

pada akhir 2015, karena masih mengacu pada undang-undang No.08 Tahun 2015 yang disebutkan pada pasal 54 ayat 6 bahwa, minimal pasangan calon harus lebih dari 2 pasangan calon. Namun sebenarnya pada UU ini mempunyai kekurangan yakni pada hak individu dalam pencalonan sehingga pihak calon tunggal melakukan gugatan uji materil ke MK terkait batas minimal pencalonan. Gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 berkenaan dengan 1 (satu) pasangan calon dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015.

Munculnya pasangan calon tunggal memiliki akar permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Pilkada di Kabupaten Blitar, yang menjadi faktor munculnya calon tunggal adalah faktor tidak adanya calon yang maju. Mulai pertama hingga terakhir batas pendaftaran hanya ada satu pasangan saja yang sudah terdaftar. Langkah tersebut merupakan strategi politik dari lawan agar penyelenggaraan pilkada ditunda sampai tahun depan. Dengan digagalkannya pilkada ini sejatinya agar mereka dapat memperkuat jaringan untuk melawan calon petahana. Strategi ini mengacu pada UU No.08 Tahun 2015, yang menunjukkan batas minimal calon yang akan maju. Setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015, kemudian disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Blitar ke berbagai pihak untuk segera mendaftarkan calon yang telah disepakati. Memang ada calon yang mendaftar, namun ada beberapa permasalahan seperti persyaratan pendaftaran yang belum dilengkapi sehingga pendaftar mereka tidak diterima. Sehingga sampai batas akhir penutupan

pendaftaran dari beberapa sesi yang telah dibuka, tidak ada satu pun calon yang mendaftar lagi sehingga hanya satu calon yang akan maju pada pilkada 2015.

Mekanisme pelaksanaan pemilu dengan calon tunggal dilakukan dengan mencoblos kolom setuju jika memilih calon pasangan untuk menjadi kepala daerah, atau dengan tidak mencoblos gambar pasangan calon. Dengan cara demikian, maka pemilih menyetujui atau memilih paslon tunggal untuk menjadi kepala daerah. Surat suara akan menjadi tidak sah jika pemilih mencoblos gambar paslon dalam surat suara.

Partisipasi *civil society* merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional, yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.⁴

Pilkada calon tunggal membawa dampak cukup besar terhadap partisipasi politik masyarakat. Tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2015 masih terbilang rendah. Dihimpun data KPU, dari 967.463 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya hanya 547.477 pemilih atau 56% dari DPT. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 419.986 atau 43.6%. Hasil perolehan suara, dari masyarakat yang menggunakan hak

⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995. hlm. 56

pilihnya dalam pilkada kabupaten Blitar 2015 adalah, Ridho Setuju sebesar 428, 075 atau 84%, Ridho Tidak Setuju 76.121 atau 16%, dan surat suara tidak sah 41.281 atau sekitar 7.6%. Dari data di atas, tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan setuju atau tidak setuju pasangan Rijanto-Marhainis Urip Widodo menjadi Bupati dan Wakil Bupati masih rendah.

Terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak, dengan diikuti oleh satu paslon, mejadikan kondisi atau suasana pilkada memang tidak beritu terasa, namun proses interaksi-interaksi politik dikalangan elit politik begitu kuat. Memang calon petahana berada dalam kondisi yang mapan, dengan hanya satu partai politik saja sebagai parpol pengusung. Disisi lain kelompok lawan juga melakukan memobilisasi masa dan koalisi untuk selalu membuat aroma kompetisi pada pilkada semakin kuat.

Aliansi besar merupakan trik politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Blitar 2015. Interaksi-interaksi politik dikalangan elit sangat intens dalam proses tawar-menawar politik. Petarungan elit lokal menjadi menarik ketika muncul beberapa pesaing, tarik ulur calon penantang terjadi dalam pilkada Kabupaten Blitar 2015, terbukti beberapa calon pernah muncul. Sebenarnya peluang dalam pengajuan menjadi calon bupati sangat terbuka, terlebih ada 37 kursi di DPRD Kab, Blitar yang tidak digunakan.

Tema ini sangat menarik untuk diteliti karena terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan mekanisme baru. Selain itu adanya interaksi-interaksi kelompok kepentingan dalam munculnya pasangan calon tunggal, memang perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi. Nilai-nilai kompetisi dalam

pilkada calon tunggal, menjadikan suasana pilkada seperti kapanye atau memobilisasi masa yang terjadi tidak begitu terasa dan hanya tawaran setuju atau tidak setuju pada spanduk milik calon tunggal. Nilai positif dalam Fenomena calon tunggal ini memang menjadikan pendidikan politik baru, karena mekanisme pemilihan ini masih pertama kali dalam pilkada serentak 2015.

Fenomena ini menjadi lebih menarik lagi ketika adanya partisipasi *Civil Society*, kemudian dihadapkan dengan permasalahan calon tunggal. Peran penting sebuah *civil society* dalam masyarakat demokrasi, perlu kita ketahui sejauh mana *civil society* ini mampu memberikan kontribusi kepada proses pelaksanaan demokrasi. Terutama sebagai sebuah tatanan masyarakat yang memberikan input dan juga sebagai output sistem politik di Indonesia. Sehingga permasalahan ini sangat menarik di teliti dari segi praktek *Civil Society* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini. Peneliti, menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan mengenai, bagaimana partisipasi kelompok *Civil Society* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Blitar tahun 2015?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Partisipasi *Civil Society* dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kabupaten Blitar 2015" peneliti akan fokus meneliti tentang keterlibatan *civil society* meliputi ormas dan LSM dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Blitar 2015. *Civil society* sebagai pihak *non state*, mempunyai kekuatan untuk memberikan dukungan maupun tekanan kepada negara. Keterlibatan *civil society* sendiri dalam pertarungan pilkada, memang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan berupa *feed back* dari calonya, namun keikutsertaan atau partisipasi *civil Society* lebih kepada memberikan pengertian maupun pemahaman tentang politik kepada anggotanya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi kelompok *Civil Society* dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Blitar tahun 2015.

E. Manfaat Penelitian

Dapat peneliti paparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang teori partisipasi politik serta konsep *civil society* khususnya dalam kajian ilmu politik, sehingga dapat memahami secara konseptual bagaimana konsep *civil society* di bidang partisipasi politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait agar menerapkan partisipasi politik dan *civil society* secara tepat. Serta dapat memberikan pemahaman partisipasi politik serta konsep *civil society* kepada masyarakat akan pentingnya penerapan keduanya. Dengan konsep maupun teori tersebut, *civil society* dapat mengamalkan dan menegakkan nilai-nilai *civil society* untuk menciptakan iklim politik yang baik.

F. Definisi Konseptual

- 1. Partisipasi dalam kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai pengertian perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
- 2. *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.⁵
- Calon tunggal merupakan fenomena baru yang terjadi dalam pemilu, definisi calon tunggal adalah peserta yang akan mengikuti suatu pemilihan hanya terdiri dari satu orang atau satu pasangan.

⁵ AS Hikam, Muhammad, *Demokratisasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999) Hal 3.

G. Telaah Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya, Permasalahan calon tunggal sebenarnya muncul dan dikenal pada saat pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama tahun 2015. Beberapa peneliti sudah ada yang menulis diantaranya yaitu:

1. Dalam jurnal "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi" tahun 2016 yang ditulis oleh Iza Rumesten RS dari Universitas Sriwijaya.⁶ Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa fenomena calon tunggal merupakan dinamika politik dan dinamika demokrasi yang pertama di pilkada serentak. Pilkada serentak tahun 2015 di satu sisi menunjukan bahwa dinamika demokrasi di tanah air semakin mengalami kemajuan, masyarakat sudah semakin melek dan cerdas politik. Di sisi lain partai politik menunjukkan kemunduran fungsi partai melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan rekrutmen politik. Partai politik harus memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam konflik. Partai politik harus melakukan penjaringan calon pasangan kepala daerah dengan obyektif dan kapabel sehingga akan menarik minat masyarakat untuk memilih. Selain memberikan pendidikan politik kepada masayarakat, partai politik juga harus melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya dalam arti mempersiapkan kader yang terbaik untuk maju dalam pesta demokarasi baik dalam bentuk

⁶ Iza Rumesten RS, Jurnal PDF *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi* (jurnal Konstitusi: 2016)

pencalonan kepala dearah, pencalonan sebagai DPRD untuk tingkat daerah maupun pencalonan untuk tingkat nasional.

Terkait dengan pendidikan politik di tingkatan internal partai politik dalam arti mempersiapkan calon pemimpin yang akan dimajukan dalam pencalonan baik itu pada tingkat lokal maupun nasional, tentu saja partai politik harus mempersiapkan sistem yang benar-benar baik dan menggerakan seluruh mesin partai. Agar terjaring calon yang benarbenar capable, mampu bersaing dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang tujuan ahirnya adalah memenangkan hati rakyat dan meraih kepemimpinan yang *legitimate*.

2. Dalam jurnal, yang berjudul *Civil Society* dan partai politik dalam demokratisasi di Indonesia, yang ditulis oleh Aditya Perdana. Diskusi mengenai *civil society* terbagi dua pandangan. Ada sebagian yang berpandangan bahwa *civil society* memiliki keterikatan yang erat dengan Negara, termasuk dalam hal ini dengan partai politik. Negara, termasuk aparatus dan kebijakannya, merupakan bagian dari konsep sebuah masyarakat politik yang dicita-citakan. Dan sebagian beranggapan civil society merupakan sebuah ranah masyarakat yang terpisah dengan ranah Negara karena dalam peran dan fungsinya yang lebih bebas dan merdeka dari intervensi Negara.

Sementara itu, konsep partai politik sebagai sebuah kelompok atau organisasi di dalam masyarakat berbeda dengan apa yang telah

⁷ Aditya Perdana," *Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia*", Jurnal Human Right Salatiga, Vol. I no. 1 (juli 2009).

disebutkan dalam *civil society. civil society* terutama dalam aspek usaha meraih kekuasaan politik melalui jalur pemilihan umum. Meski keduanya juga memiliki kesamaan dalam usaha untuk berkontribusi terhadap kepentingan publik.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Partisipasi *Civil Society* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kabupaten Blitar 2015". Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dimana metode kualitatif deskriptif ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek dari penelitian peran *civil society* dalam pilkada calon tunggal. Metode ini mempunyai karakteristik ketika dalam penelitian bersifat deskripsi, dan sasaran penelitian bertindak sebagai subjek penelitian. Pemilihan informan di lakukan dengan kunci pemegang sumber yang paling akurat yang hendak di teliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Partisipasi *Civil Society* Dalam Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Blitar 2015". Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan penelitian lapangan, dapat dipergunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk menemukan,

membutikan dan mengembangkan dari pengetahuan tertentu dan pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi suatu masalah.⁸

Artinya penelitian ini berangkat dari studi kasus di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. Sekaligus penulis mendatangi tempat yang menjadi lokasi penelitian, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menemui informan yang telah dilakukan.

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Blitar sesuai dengan judul tentang "Partisipasi *Civil Society* dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kabupaten Blitar 2015". Penentuan pemilihan lokasi penelitian ini, karena peneliti melihat adanya dinamika politik yang cukup menarik dalam proses pencalonan kepala daerah. Kemudian Blitar juga merupakan salah satu Kabupaten yang hanya memiliki satu calon (calon tunggal). Pertimbangan selanjutnya dalam pemilihan lokasi penelitian ini, karena di daerah Kabupaten Blitar terdapat *civil society* yang berpartisipasi pada pilkada serentak 2015. Sehingga sangat memungkinkan untuk mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya partisipasi masyarakat.

Lokasi tempat wawancara akan dilakukan di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian yakni ormas maupun LSM. Lembaga tersebut meliputi Ormas NU, Kelompok Nelayan dan juga Kelompok Tani Makmur,

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2010, Bandung: Alfabeta, hal. 2

karena kelompok tersebut secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Peneliti memilih penelitian di Ormas Nahdlatul Ulama dengam alasan, karena NU merupakan salah satu organisasi yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Selain itu, NU juga memiliki basis masa yang cukup besar, sehingga sangat memungkinkan mempengaruhi jalannya pemilihan kepala daerah.

Dipihak lain seperti kelompok Nelayan dan petani, yang sejatinya tidak mempunyai afiliasi politik dengan partai manapun. Dapat memberikan kontribusi berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mensuksekan pilkada. Momentum pemilihan kepala daerah sebagai tolak ukur tentang bagaiamana kekuatan *civil society* dalam mempengaruhi dinamika pelaksanaan pilkada yang terjadi. Dengan begitu penelitian ini menjadi menarik karena ormas menjadi salah satu faktor yang menjadikan pemilihan ini menjadi dinamis.

4. Informan Penelitian dan teknik Penentuan Informan

Adapun Informan yang digali oleh peneliti pada penelitian Partisipasi Civil Society Dalam Pilkada Calon Tunggal adalah beberapa kelompok masyarakat, yakni :

- 1) Tokoh NU
- 2) Tokoh Paguyuban Tani Makmur
- 3) Tokoh Kelompok Nelayan

Diharapkan dari informan tersebut akan semaksimal mungkin memberikan informasi kepada peneliti agar dapat digali seakurat mungkin. Dalam teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik *Purpossive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti mengklasifikasikan informan menjadi beberapa, mulai dari tokoh NU, Kelopok Nelayan dan Paguyuban Tani, sebagi pelaku yang masuk kedalam dinamika politik serta dilengkapi data dari tanggapan beberapa masyarakat.

5. Sumber data dan jenis data

Sumber data adalah subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian. Data dalam penelitian dapat diambil dari berbagai surber, sumber data dapat dibedakan melalui data primer dan data skunder. Dengan mengidentifikasi sumber data, akan memudahkan peneliti dalam memilih metode pengumpulan data guna memudahkan dalam proses melakukan pengumpulan data. Sumber data dibagi menjadi:

a. Sumber data Primer

Data yang yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengambilan data, langsung kepada subjek sebagai

.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.

¹⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 91

sumber informasi yang dicari. Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan sifatnya mendasar dalam penelitian ini. Hasil data diperoleh dari informan setelah melakukan proses wawancara atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari informan yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan atau hal-hal yang dibutuhkan tentang penelitian ini. Sehingga proses untuk memperoleh data informan memiliki peran dan fungsi, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

b. Sumber data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil atau diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa bendabenda tertulis seperti buku-buku, internet, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Sumber data skunder sebagai penunjang sumber utama atau untuk melengkapi sumber data primer. Sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur sebagai rujukan atau sebagai referensi yang dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan kajian pustaka dan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini baik yang berasal dari dari buku maupun internet seperti jurnal online dan artikel jurnal atau

_

¹¹ Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hal, 91

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 115

koran yang mengangkat tema mengenai civil socety dalam pilkada. Sedangkan untuk dokumentasi sebagai tambahan, dimana bisa berupa foto maupun dokumen dan lain sebagainya.

6. Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini, menggunakan teknik¹³:

Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam proses wawancara peneliti turun langsung ke lapangan, dengan melakukan proses tanya jawab terhadap informan terkait partisipasi civil society dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Blitar 2015.

Informasi berupa data akan didapat langsung melalui informan dengan proses wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah indepth interview atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara dalam proses penggalian data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Dalam penggalian

¹³Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

hal. 134

data yang akurat peneliti berusaha mengklasifikasikan informan menjadi beberapa bagian, untuk pembagiannya meliputi dari berbagai organisasi *civil society* adalah tokoh ormas, unsur pemerintah melalui lembaga penyelenggara pilkada yakni KPU Kabupaten Blitar, serta unsur dari masyarakat Kabupaten Blitar.

Unsur *civil society* terdiri dari tokoh ormas Nahdlatul Ulama, Kelompok Nelayan dan Paguyuban Tani Makmur dalam hal ini bisa di wakili anggota di dalam organisasi Nahdlatul Ulama maupun dari anggota pengurus Kelompok Nelayan dan pengurus Paguyuban Tani Makmur. Dari unsur pemerintah sebagai pihak penyelenggara, diwakili oleh komisioner KPU Kabupaten Blitar. Selain dari organisasi *civil society* peneliti juga mengambil data dari masyarakat sebagai pihak yang memakai mekanisme referendum. Masyarakat dipilih berdasarkan peran serta dan bagaimana masyarakat mengamati tentang jalanya pilkada calon tunggal.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni setiap informan diberikan pertanyaan yang sama. Dalam wawancara berstruktur peneliti juga telah menyiapkan instrument atau daftar pertanyaan. Dengan menggunakan cara tersebut peneliti akan dapat memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dalam proses wawancara, seperti yang telah disebutkan diatas, peneliti mempersiapkan instrumen pertanyaan dengan menggunakan alat yang dinamakan

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2010), hal 273

interview guide. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari kelompok yang terlibat dalam proses pilkada.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, dokumentasi adalah kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar. Dokumentasi bisa berbentuk gambar maupun arsip atau dokumen yang diperoleh dari informan. Dari dokumen tersebut peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan, melalui beberapa dokumentasi sebagai sumber informasi tambahan, dokumentasi juga digunakan sebagai penunjang data ataupun bukti dalam sebuah penelitian.

Sesuai dengan pernyataan diatas, penulis berusaha mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang penulis butuhkan langsung dari lapangan. Data-data dan dokumentasi tersebut, penulis memilih data dokumen maupun arsip yang berkaitan langsung dengan proses partisipasi *civil society* pada pilkada calon tunggal Kabupaten Blitar 2015. Data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mengenai hasil wawancara maupun hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Blitar.

¹⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 135.

7. Analisis Data

Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan dijabarkan secara sistematis. Adapun dengan menggunakan Reduksi Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Yang pertama Reduksi data yakni mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian, yang kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis data berupaya memilah-milah kepada bagian data yang memiliki kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi, setelah data ditemukan kesamaannya maka data dicari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, sedangkan kategori yang satu dengan yang lainnya diberi nama/label. 16

8. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini peneliti dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus ikutserta dalam memperoleh data yang valid.
- b. Teknik keabsahan data ketekunan/keajegan pengamatan, peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid serinci mungkin yang nantinya peneliti nanti lebih bersifat terbuka.

¹⁶ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hal 288-289.

- c. Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi, diskusi merupakan tenik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan data yang ditemukan nanti masih didiskusiakn dengan rekannya dan teknik keabsahan data uraian rinci.
- d. Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari serinci mungkin sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan

9. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik dimana peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa

 $^{^{17}}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.(Bandung: Alfabeta CV, 2010), hal 221

sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Telaah Pustaka dan Sitematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Kerangka Teori ini terdiri dari beberapa pengertian dari konsep civil society.

BAB III SETTING PENELITIAN

Lokasi penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknis analisi data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

Pada bab ini penulis memaparkan seluruh uraian tetang hasil penelitian, juga pada bab ini penulis melakukan pembahasan serta menganalisa data, yaitu memaknai hasil penelitian tentang partisipasi civil society dalam pilkada calon tunggal di Kabupaten Blitar 2015.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memuat analisa data, yaitu memaknai hasil penelitian tentang partisipasi civil society dalam pilkada calon tunggal di Kabupaten Blitar 2015 yang diperoleh berdasarkan dari paparan data dan pembahasan yang telah di paparkan oleh bab-bab sebelumnya.

Memuat Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN